



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TATI SETIATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 425859

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.875.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/233 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/45 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 241 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 122.000.000

1. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 /SPM.SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.358.400

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.093.358.400

**III. HUTANG**

Rp. 70.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.023.358.400

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.